

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. KonPress.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. UII Press.
- Danang Sunyoto. (2013). *Hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha*. Pustaka Yustisia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. (n.d.). *Panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah*.
- Hehanussa, D. J. A. (2016). *Metode penelitian hukum*.
- Huda, N., & Nazriyah, R. (2019). *Teori & peraturan perundang-undangan*. Nusa Media.
- Husni, L. (2003). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nommensen, S. (2009). *Metode penelitian hukum*. PT Bumi Initama.
- Rozali, R. (n.d.). *Asas-asas dan teori pembentukan perundang-undangan*.
- Sinamo, N. (2009). *Metode penelitian hukum*. PT. Bumi Initama.
- Sjafrizal. (2015). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. PT Rajagrafindo Persada.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Supriyanti, H. (2013). *Kesejahteraan pekerja dalam hubungan industrial di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan kebijakan publik ekonomi sumber daya manusia*. Graha Ilmu.
- Triyanto, D. (2004). *Hubungan kerja di perusahaan jasa konstruksi*. Citra Aditya Bakti.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode penelitian ekonomi syariah*. CV Adi Karya Mandiri.
- Zainudin, A. (n.d.). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

JURNAL

- Aan, E. W. (2019). Implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*.
- Aang, S. (2024). *Perlindungan hukum bagi peserta bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022*.
- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *Jurnal Hukum Yustitia*.
- Yusuf, M. A. (2025). Jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal sebagai wujud pelaksanaan Sila Kelima UUD 1945 di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Artioko, F. R. (2022). Pengadopsian partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Al-Qisth Law Review*.
- Bloom, N., & Van Reenen, J. (2013). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *NBER Working Papers*.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Haryanti, D. (2015). Konstruksi hukum lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Hidayat, R. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat

(Studi meningkatkan pelayanan pada masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang).

Simamora, M. W. (2025). Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi 2024 (Skripsi, Universitas Jambi). *Universitas Jambi Repository*.

Hunaepi, A. (2015). *Implementasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) di Kabupaten Lebak*.

Dasopang, L. M., Sagala, S. S., Pasaribu, R. F., Fanisa, S., & Purba, S. H. (2024). Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Systematic literature review. *Indonesian Journal of Health Science*.

Kambu, W. M. (2021). Tinjauan yuridis tentang hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*.

Muin, F. (2015). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.

Akbar, F., Arif, M., & Syahriza, R. (2023). Peran asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap buruh yang bukan penerima upah (BPU) di Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*.

Prianto, W., Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Jl. Mayor Jenderal Katamso, Kec. Baruga, & Kota Kendari. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

Sumarliani, S. (2016). Implementasi program BPU (Bukan Penerima Upah) BPJS Ketenagakerjaan terhadap wirausaha mandiri (Studi kasus pada pekerja informal di Kabupaten Lumajang). *Humaniora*.

Verina, M. E. (2021). *Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). *Repository UIN Suska*.

Pradina, E., & Lubis, F. A. (2023). Peran asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap buruh yang bukan penerima upah (BPU) di Tanjung Morawa. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*.

Nasution, A. I. (2020). Keabsahan peraturan daerah memasukkan peraturan bersama menteri sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*.

Fadhil, M., Nuryanti, N., & Muslim, M. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan peserta bukan penerima upah pada BPJS Ketenagakerjaan perspektif ekonomi syariah. *Journal of Sharia and Law*, 3(2), 341–355.

Tsabitah, A. F., & Hoesin, H. S. H. (2024). Perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. *Jurnal Ilmiah Global Education*.

Masitah, S. (2014). Urgensi Prolegda dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau*.

Pemerintah Kabupaten Bintan. (2022). *Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

NASKAH AKADEMIK

Shelemo, A. A. (2023). Naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Blora tentang penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja Kabupaten Blora melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. [*Nama Jurnal jika ada*], 13, 104–116.

INTERNET

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2025). *Panduan lengkap iuran BPJS Ketenagakerjaan 2025: Besaran, cara pembayaran, dan manfaatnya*. Infohukum. Diakses pada 7 Agustus 2025, pukul 08.45 WIB, dari <https://www.fh.umsu.ac.id>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. (2024, 16 Desember). *Keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Bintan Agustus 2024*. <https://bintankab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/16/201>. Diakses pada 8 Februari 2025, pukul 13.30 WIB.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk teknis bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan sektor informal*. <https://kemnaker.go.id/>. Diakses pada 5 Februari 2025.

Mediana. (2025). Marak PHK dan pekerja informal, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sulit bertambah. *Kompas.id*. Diakses pada 12 Februari 2025, dari <https://www.kompas.id>

KBBI. (2025). *Urgensi*. <https://kbbi.web.id/urgensi>. Diakses pada 11 Maret 2025, pukul 08.20 WIB.